

PERANAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PILAR DEMOKRASI PASCA REFORMASI DI INDONESIA

Romli Mubarak *

ABSTRACT

Political parties initially formed on the basis of a desire to unite the various groups of people who have the same vision and mission, so that the mind and their orientation can be consolidated. Departing from that, it can be described that political parties are organized groups, where members have an orientation, values, and ideals of the same, which aims to realize these goals by acquiring political power and seize the political. In order to achieve the objectives of political parties should be able to carry out their functions properly. The functions of political parties are as follows: (1) Means of Political Communication, (2) Means of Political Socialization, (3) Means of Political Recruitment, and (4) Means Regulatory Conflicts.

Post-reform in Indonesia, political parties are not able to function properly as a pillar of democracy. Several factors could be the cause of the failure of political parties in Indonesia to perform its functions, namely (1) the party system in Indonesia, (2) cultural elitism, and (3) political pragmatism itself.

To improve the conditions said, one of the political parties as democratic institutions that play an important role in the democratic process should be able to provide political education for the people of Indonesia, and to be able to put its position actively and creatively in order to carry out the duties and functions both in the preparation for the general election and in the aftermath of the elections.

Keywords : Political Parties, the Pillars of Democracy, Reform

ABSTRAK

Partai politik pada awalnya dibentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diuraikan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisir, dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Untuk dapat mencapai tujuannya maka partai politik harus mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Fungsi partai politik adalah sebagai : (1) Sarana Komunikasi Politik, (2) Sarana Sosialisasi Politik, (3) Sarana Recruitment Politik, dan (4) Sarana Pengatur Konflik.

Pasca reformasi di Indonesia, partai politik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pilar demokrasi. Beberapa faktor sebagai penyebab gagalnya partai politik di Indonesia dalam menjalankan fungsinya yaitu (1) Sistem kepartaian

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : romli_mubarok@ymail.com

di Indonesia, (2) Budaya elitisme, dan (3) Pragmatisme partai politik itu sendiri.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka Partai Politik sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokrasi harus mampu memberikan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia, dan harus dapat menempatkan posisinya secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya baik pada masa persiapan pemilihan umum maupun pada masa setelah pemilihan umum.

Kata Kunci : Partai Politik, Pilar Demokrasi, Reformasi

PENDAHULUAN

Diawal masa Reformasi, euphoria kebebasan politik telah memberi celah munculnya kekuatan-kekuatan politik baru yang selama masa Orde Baru tidak dimungkinkan terjadi. Pembatasan jumlah partai politik di era Orde Baru telah berubah menjadi era multipartai pada Pemilu 1999 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Dapat dilihat pada Pemilu tahun 1999 adanya 141 partai politik yang terdaftar di departemen kehakiman, namun yang ikut dalam pemilu saat itu hanya 48 partai politik saja setelah dilakukannya verifikasi.¹ Pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan 6 partai local di Aceh. Sebenarnya semangat ini pernah muncul diawal kemerdekaan sebagai buah dari revolusi panjang sebuah negara dalam melawan penindasan kolonial. Euphoria kebebasan politik waktu itu sangat tergambarkan oleh muncul banyak sekali partai politik dengan segala aliran yang menjadi basis dari ideologinya. Namun bedanya dengan Partai politik tahun 50an atau partai politik generasi kedua itu adalah tidak adanya ideology yang jelas pada partai politik genarasi keempat ini.

Demokrasi yang diusung di era reformasi mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung, salah satunya karena banyak pejabat politik yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain memunculkan ketidakpercayaan rakyat pada penguasa mendorong

1 Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, Setara Perss, Malang, 2009, hal 160-168.

rekrutmen pejabat politik ke arah demokrasi langsung. Sehingga tidak mengherankan bila rekrutmen hampir semua jabatan politik dilaksanakan dalam format demokrasi yang bergerak pada hubungan negara dan warga negara secara langsung.

Fase demokrasi langsung ini merupakan era baru reformasi politik di Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemerdekaan Indonesia. Rekrutmen politik skala nasional ini merupakan perkembangan demokrasi yang mendapat pengakuan dunia karena keberhasilannya. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan rekrutmen politik dalam tataran demokrasi ini, pada tahun 2005 telah dilakukan proses rekrutmen politik elit daerah sebagai kelanjutan dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang telah melahirkan pasangan pemimpin politik berbasis legitimasi rakyat, yaitu Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla.

Ketidakpercayaan rakyat dan era reformasi mendorong adanya pemilukada langsung. Hal ini tidak langsung berkaitan dengan baik atau tidaknya demokrasi, karena di negara lain juga terdapat variasi pelaksanaan demokrasi yang langsung. Derajat kepentingannya adalah terpilihnya pejabat politik yang akuntabel sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Salah satu persyaratan mewujudkan demokrasi adalah adanya partai politik yang berfungsi maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dan sebagai media untuk melakukan bargaining kebijakan dengan negara. Sebagai

perwujudan dan tersalurnya aspirasi publik oleh partai politik maka efektifitas fungsi partai politik haruslah dijunjung tinggi.

Partai politik pada awalnya di bentuk atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diuraikan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisir, dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.² Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskannya sendiri. Namun begitu menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita bagaimanakah sebenarnya peranan partai politik sebagai pilar demokrasi pasca reformasi di Indonesia ?

PEMBAHASAN

Partai Politik

Partai politik secara umum adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan - kebijaksanaan mereka.³ Carl J. Friedrich menyatakan

2 Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 404.

3 *Ibid*

bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan kekuasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.⁴ Sedang R.H. Soltau mengatakan yang dimaksud partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih - bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.⁵

Rusadi Kantaprawira mendefinisikan partai politik dengan lebih jelas dan terperinci lagi. "Partai politik yaitu organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai sarana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa".⁶

Dari pendapat keempat pakar dibidang politik tersebut telah menggambarkan tentang makna partai politik yang memiliki kesamaan, yaitu partai politik merupakan suatu kelompok manusia atau warga negara yang terorganisir dan mempunyai suatu tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya partai politik sebagai suatu sarana untuk manusia atau warga negara untuk membentuk suatu organisasi dalam menyalurkan aspirasinya, yang kemudian diwujudkan dengan fungsi

4 *Ibid*.

5 *Ibid*.

6 Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung, 1999, hal. 63

partai politik itu sendiri.

Fungsi Partai Politik

Miriam Budiardjo menyebutkan beberapa fungsi dari partai politik.⁷

a. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat pendapat, aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga ke simpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam konteks ini, partai politik merupakan salah satu bagian dari sistem pada sistem komunikasi. Adapun sistem komunikasi pada kegiatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

- 1). Pesan yang disampaikan yaitu aspirasi yang terdapat dalam masyarakat
- 2). Penyampai pesan yaitu masyarakat yang mempunyai aspirasi
- 3). Sarana/wadah penyampai pesan adalah Partai Politik dan Anggota Legislatif berasal dari partai politik.
- 4). Penerima Pesan adalah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Bagian-bagian dari sistem tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, maka pemahaman akan fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik oleh partai politik adalah hal yang wajib dan harus dilaksanakan.

b. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (Instrument Of Political Socialization). Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dalam konsteks ini juga partai politik merupakan wadah bagi sosialisasi produk hukum dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemegang

kekuasaan (legislatif maupun eksekutif). Partai politik merupakan pihak yang berpran untuk melakukan pemberitahuan/ sosialisasi produk hukum atau kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat terutama masa pemilihnya. Oleh karena itu, jika partai politik menyadari dan melaksanakan fungsi tersebut, maka tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami setaip produk hukum atau kebijakan dari pemerintah yang telah diberlakukan.

c. Partai Politik Sebagai Sarana Recruitment Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*Political Recruitment*). Dalam konteks ini partai politik tidak bersifat instan dalam mencalonkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan (legislatif atau eksekutif) tetapi dalam 5 tahun (per priode pemilihan umum) partai politik mempunyai program memproduksi warga negara yang akan dicalonkan ke legislatif ataupun eksekutif. Partai politiklah yang berperan memberikan pengetahuan (keahlian) dan pengalaman kepada warga negara yang mempunyai potensi untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif maupun eksekutif). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, rekrutment politik diatur pada Pasal 29 yang menegaskan:

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. Anggota Partai Politik;
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan

7 Miriam Budiardjo, Op.Cit, hal. 163-164.

melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mem pertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

d. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Peranan Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi Pascareformasi Di Indonesia

Fungsi-fungsi partai politik yang diuraikan di atas semestinya dilaksanakan dengan baik oleh partai politik sehingga peranan partai politik sebagai sebagai pilar demokrasi di Indonesia dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Namun begitu kenyataan menunjukkan bahwa banyak fungsi-fungsi partai politik yang tidak dipenuhi sehingga hal ini menyebabkan gagalnya partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya.

Fungsi partai sebagai sarana komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Informasi merupakan hal yang sangat penting ketika kita berbicara organisasi modern, karena organisasi (Pemerintah) tersebut akan dapat mempertahankan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari

masyarakatnya. Banyak rezim di dunia ini yang tidak dapat mempertahankan kekuasaannya yang dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dari situ muncul ketidak puasan masyarakat kepada penguasanya yang kemudian berujung pada proses penggantian penguasa baik itu dengan cara yang diatur secara konstitusi ataupun dengan kudeta. Disisi lain informasi juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dengan cara seperti apa dan bagaimana capaian yang dikehendaki. Partai politik ini berada diantara pemerintah dan masyarakat, sehingga sangat strategis posisinya dalam hubungan ini. Dalam hubungan ini tentunya akan sangat tergantung di pihak mana partai politik berada, apakah di pihak pemerintah ataukah oposisi, tentunya hal ini akan mempengaruhi isi dari pemberian informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan sudut pandang atau nilai-nilai yang diperjuangkan. Komunikasi politik pasca reformasi dianggap hanya sebagai penyalur aspirasi masyarakat pada saat pemilihan umum saja sedangkan dalam periode lima tahun pemerintahan setelah pemilihan umum, partai politik mengabaikan fungsi tersebut. Padahal fungsi ini sangat berperan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan dari program pemerintahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka mengakibatkan banyak persoalan yang terjadi di masyarakat tidak selesai justru mengambang. Dalam hal ini partai politik lebih menyenangi masyarakat melakukan demonstrasi ke DPRD atau ke Kantor Gubernur. Padahal idealnya partai politik mempunyai peran yang sentral sebagai pihak yang dapat mengakomodir permasalahan masyarakat untuk di teruskan ke anggota DPRD yang berasal dari partainya maupun Kepala Daerah. Sebagai salah satu contoh adanya sengketa lahan. Banyaknya kasus sengketa lahan yang tidak

selesai/masih mengambang/belum terselesaikan, masyarakat melakukan demontarsi tetapi partai politik justru memiliki peran yang masih kecil, padahal daerah tersebut menjadi basis masanya.

Fungsi Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah masyarakat mengetahuinya arti pentingnya politik beserta instrumen-instrumennya. Sosialisasi politik kemudian menghasilkan budaya politik dalam bentuk perilaku politik yang tidak destruktif, mengutamakan konsensus dibanding menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, mempunyai pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan atau membuat keputusan yang kemudian perilaku seperti akan menjadi modal untuk pelaksanaan demokrasi (kedewasaan demokrasi). Pasca reformasi, sosialisasi politik dianggap hanya sebagai penyampai janji-janji politik pada saat pemilihan umum tidak pernah dianggap bahwa partai politik berperan dalam memberikan pengetahuan politik dengan terlibat dalam melakukan sosialisasi atas produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Bupati/walikota) dan kebijakan pemertintah lainnya kepada masyarakat. Yang terjadi justru partai politik beranggapan bahwa pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi tersebut adalah pihak eksekutif saja. Padahal idealnya di sinilah peran partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyadaran hukum dan politik kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui produk hukum daerah dan arah kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah.

Fungsi Partai Politik sebagai sarana recruitment politik. Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada

umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Dalam alam demokrasi walaupun individu disini diberikan kesempatan sama untuk mencapai derajat tertentu, untuk mendapatkan suatu hal tetapi ada aturan bagaimana cara individu tersebut mencapai hal tersebut melalui undang-undang atau peraturan yang ada. Dengan adanya partai politik maka individu-individu tadi akan lebih mudah untuk mendapatkan keinginannya di bidang politik, dalam artian walaupun tanpa partai politikpun bisa mendapatkannya tetapi tentunya akan lebih sulit. Rekrutmen oleh partai politik pasca reformasi lebih dianggap pola instan pada saat dibutuhkan saat menjelang pemilihan umum dengan menjual kata-kata rekrutment secara demokratis dan terbuka. Dalam pelaksanaannya partai politik lebih senang menyampaikan pengumuman di media massa tentang penerimaan calon DPRD ataupun Calon Kepala Daerah. Padahal secara ilmiah banyak penelitian menunjuk kan bahwa pola tersebut memiliki hasil secara kualitas justru tidak menguntungkan. Hal ini ditandai dengan masuknya calon legislatif yang tidak memahami tugasnya sebagai legislatif ataupun masuknya Calon Kepala Daerah dari orang-orang yang belum memiliki pengalaman memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu sudah semestinya partai politik melakukan pengkaderan kepada anak bangsa yang mempunyai potensi sebelum mereka di calonkan menjadi anggota DPRD atau Kepala Daerah. Fungsi partai yang ini oleh undang-undang menekankan pada prinsip demokrasi dan terbuka lalu ditafsirkan oleh partai politik adalah dengan memasang pengumuman penerimaan calon Anggota DPRD atau Kepala Daerah. Padahal idealnya fungsi

rekrutment merupakan yang sangat penting bagi partai politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa partai politik bahkan ada yang menjaring calegnya melalui iklan penjangkaran di media cetak nasional. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan organisasi partai politik untuk menghasilkan kader-kader melalui proses kaderisasi internal. Kasus-kasus ini ditemukan terutama pada partai politik baru yang didirikan hanya sekedar memenuhi kuota komposisi caleg.⁸

Fungsi Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik (Conflict Management). Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat Indonesia khususnya, dimana dengan berbagai macam keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral. Tentunya akan banyak sekali kepentingan yang akan saling berbenturan, hal ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan begitu saja. Memang konflik dalam masyarakat itu tidak bisa dihilangkan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana manajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut sifatnya tidak merusak hubungan antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi seharusnya berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Idealnya partai politik

8 Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik 2009, Jakarta, 2010. xxxvii

menanggapi permasalahan atau konflik dalam masyarakat dengan memberikan pencerahan kepada semua pihak yang atas permasalahan/konflik tersebut, namun kadangkala dalam pelaksanaan pengatur konflik lebih cenderung menciptakan kekisruhan informasi dalam masyarakat.

Kasus Pilkada DKI tahun 2012 merupakan tamparan bagi partai politik. Berkumpulnya partai politik dan mendukung salah satu kandidat, dalam hal ini mendukung pasangan kandidat Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (Foke-Nara), ternyata tidak diikuti oleh suara pemilih. Suara pemilih terbesar memilih pasangan Joko Widodo – Basuki Cahaya Purnama (Jokowi-Ahok). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat mendeklarasikan dukungan terhadap Foke-Nara menjanjikan dukungan signifikan, menemukan kenyataan bahwa pernyataan mereka itu tidak terbukti. Ucapan mereka hanyalah janji saja. Begitu juga partai-partai pendukung lainnya, menemukan kenyataan bahwa pergerakan mereka ke salah satu kubu tidak diikuti oleh para pemilih. Pertambahan suara Foke-Nara dibanding putaran pertama tidak sebanyak janji partai-partai pendukung.

Realitas ini menggambarkan bahwa keberadaan partai politik tidak lagi “dilihat” rakyat. Partai politik tidak lagi menjadi referensi dalam memilih. Partai politik telah ditinggal rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekarang ini partai politik sedang berada di titik lemah dilihat dari sisi hubungannya dengan rakyat. Kondisi ini amat memprihatinkan karena seharusnya partai merupakan media jembatan antara penguasa dan yang dikuasai, jembatan antara pemerintah dengan rakyat. Lemahnya partai politik bisa mengganggu agenda besar bangsa untuk mendapatkan tokoh-tokoh yang berkualitas dan benar-benar peduli rakyat. Sebagai produsen utama calon-calon pemimpin bangsa, partai politik seharusnya terus berupaya melakukan penggalan calon-

calon pemimpin bangsa secara baik. Sayangnya, keharusan ini diabaikan. Elite partai hanya sibuk memperkuat posisinya sendiri seraya mencari keuntungan pribadi dari partai. Mereka terlihat seperti benalu bagi partai.

Terbukti lemahnya partai politik dalam Pilkada DKI seharusnya dijadikan momen evaluasi. Partai politik harus melakukan refleksi dan oto-kritik untuk perbaikan parpol ke depan. Sudah seharusnya partai politik serius dalam melakukan fungsi-fungsi partai politik terutama terkait dengan rekrutmen dan kaderisasi. Rekrutmen partai untuk pejabat publik hendaknya tidak lagi dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis, lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elite parpol dan “sumbangan” kandidat terhadap parpol tersebut. Jika demikian, parpol memurahkan dirinya hanya sebagai kendaraan sewaan. Selain itu, partai politik juga perlu melakukan perbaikan pada fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik.

Kasus di atas menunjukkan bahwa pasca reformasi di Indonesia, partai politik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pilar demokrasi. Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab gagalnya partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya. Pertama adalah sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia sejak jaman Kemerdekaan mengadopsi sistem multi partai dengan segala variannya sebagai perwujudan kemajemukan Indonesia. Secara spesifik, pada negara berkembang partai politik yang ada akan membentuk sistem yang terpolarisasi sebagai akibat dari lebarnya jarak ideologi. Keadaan tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil karena partai politik yang ada cenderung untuk terlibat dalam konflik horizontal. Hal itu juga akan menyebabkan partai politik kurang dapat menjalankan fungsi komunikasi dan sosialisasi politik di masyarakat.

Kemudian kita juga melihat budaya elitisme sebagai alasan kedua mengapa partai politik di Indonesia kurang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada partai politik di Indonesia, partisipasi politik masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Pada perkembangannya, budaya tersebut membuat partai hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu dan bahkan bisa berkembang menjadi semacam dinasti politik dalam partai. Hal itu mungkin menjadi strategi partai politik untuk mempertahankan ideologi dan kepentingannya. Kalau sudah begitu, fungsi rekrutmen partai politik tidak akan berjalan sempurna dan bisa menjadi preseden buruk dalam pendidikan politik di masyarakat.

Faktor lain yang bisa menjadi penyebab kegagalan fungsi partai politik di Indonesia adalah pragmatisme partai politik itu sendiri. Pada dasarnya ideologi partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh jalur-jalur agama, kelas dan kebangsaan. Secara khusus kajian tentang partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh adanya politik aliran, yaitu beberapa aliran ideologis yang berkembang dan memengaruhi kehidupan politik Indonesia.⁹ Namun pada dewasa ini, idealisme partai seakan dikalahkan oleh budaya pragmatisme yang menyebabkan partai politik di Indonesia lebih berpikir untuk mempertahankan kekuasaan politiknya saja daripada mempertahankan idealisme semata. Dikhawatirkan keadaan tersebut akan menyebabkan partai politik melupakan tugasnya sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan.

Sebenarnya kegagalan fungsi partai politik tersebut bukanlah suatu hal yang jarang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia masih mengalami masa transisi dari beberapa sistem politik

8 Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik 2009, Jakarta, 2010. xxxvii

9 Ratnawati, Sistem Kepartaian di Era Transisi, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fisipol UGM, Yogyakarta. 2006, hal. 27.

untuk mencapai sistem yang stabil. Namun apabila partai politik gagal menjaga tugas dan fungsinya dengan baik, maka masa transisi tersebut hanya akan diwarnai oleh ketidakstabilan di bidang politik yang kemudian berimbas pada bidang sosial dan ekonomi. Secara sederhana rakyat akan melihat partai politik gagal dalam mengemban amanat rakyat dan hal itu akan menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap partai politik. Dampaknya adalah partisipasi rakyat dalam politik akan menurun tajam.

Untuk memperbaiki kondisi di atas, maka Partai Politik sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokrasi, harus dapat menempatkan posisinya secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai representation of idea. Partai politik harus mampu memberikan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia.¹⁰ Selanjutnya partai politik bersama-sama dengan institusi demokrasi lainnya seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers, harus secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya baik pada masa persiapan pemilihan umum (pre election) maupun pada masa setelah pemilihan umum (post election).

Bagi setiap partai politik hendaknya selalu melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi, salah satu diantaranya adalah perbaikan dari aspek struktural partai agar setiap jajaran struktural partai menempatkan dirinya secara aktif sebagai bagian utuh dari sistem politik dan sistem kemasyarakatan secara holistik, sehingga di masa yang akan datang partai politik akan menjadi suatu lembaga; saluran; sarana; wadah; tempat bagi rakyat untuk berkeluh kesah mengenai segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan dapat menjadi saluran komunikasi dengan berbagai pihak dalam

10 Surono, *Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa*, PSP-Press, Yogyakarta, hal. 131.

kehidupan nyata.

Salah satu hal penting dalam perbaikan fungsi struktural internal partai adalah dengan mewajibkan seluruh Pimpinan Parpol pada berbagai tingkatan struktural untuk selalu turun kepada masyarakat dan selalu berhubungan dengan masyarakat, tanpa terkecuali. Dari mulai tingkat yang paling atas sampai jajaran struktural parpol yang paling bawah, tentunya berdasarkan jenjang kepengurusan yang ada, struktur yang berada di tingkat yang paling bawah akan selalu berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Hal itu berkaitan dengan wilayah/teritorial yang luasnya tidak terlalu besar dengan jumlah masyarakat yang tidak terlalu banyak juga. Namun jajaran struktural parpol yang di level atas pun harus secara aktif terjun di tengah - tengah masyarakat untuk memperkuat kerja jajaran struktural di level bawah.

KESIMPULAN

Partai politik berperan atau tidaknya sangat bergantung pada bagaimana menjalankan fungsi-fungsi partai politik baik sebagai : (1) Sarana Komunikasi Politik; (2) Sarana Sosialisasi Politik; (3) Sarana Recruitment Politik; dan (4) Sarana Pengatur Konflik. Pada Pasca reformasi di Indonesia, peranan partai politik masih dapat dikategorikan sangat rendah karena tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pilar demokrasi. Beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya partai politik di Indonesia dalam menjalankan fungsinya karena : (1) Sistem kepartaian di Indonesia; (2) Budaya elitisme; dan (3) Pragmatisme partai politik itu sendiri.

SARAN

Untuk memperbaiki kondisi partai politik sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokras, maka disarankan agar

memberikan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia khususnya bagi para anggota-anggota partai politik, dan harus dapat menempatkan posisinya secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya baik pada masa persiapan pemilihan umum (pre election) maupun pada masa setelah pemilihan umum (post election).

DAFTAR PUSTAKA

- Firmanzah, *Persaingan , Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik 2009*, Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, Setara Perss, Malang, 2009.
- Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Ratnawai, *Sistem Kepartaian di Era Transisi*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan–Fisipol UGM, Yogyakarta, 2006.
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru, Bandung, 1999.
- Surono, *Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa*, PSP-Press, Yogyakarta, 2010.
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.